

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
DAN PENGAWASAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU  
(Studi Kasus : BPKD, Inspektorat, DPMD dan DPRD  
di Provinsi Bengkulu)**

**Veny Marlana, Subaeti**

**Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu**

**ABSTRAK**

his research uses data quality test analysis method, multiple linear regression test, hypothesis test and determination test. The calculation results obtained by the regression equation  $Y = 6.903 + 0.274X_1 + 0.371X_2$ , with a regression coefficient (r) of 0.942 with a coefficient of determination (R Square or R<sup>2</sup>) of 0.887 this shows that jointly the variables Implementation of Reporting Standards Public Sector Accounting (X1) and Supervision of Financial Reporting Quality (X2) on Government Performance Accountability (Y) is influenced by 88.7% while the remaining 11.3% is influenced by other variables not included in the study.

Based on the results of partial testing shows the variable Application of Public Sector Accounting Reporting Standards (X1) and Financial Reporting Quality Supervision (X2) each variable has a significant influence on Government Performance Accountability (Y) with a tcount of 2.965 (X1) and 2.364 (X2) and t table is 1.6828 or tcount > t table so Ha is accepted by Hoditolak.

Based on the results of simultaneous testing shows that the variable Application of Public Sector Accounting Reporting Standards (X1) and Financial Reporting Quality Supervision (X2) have a simultaneous or jointly significant effect on Government Performance Accountability (Y) with fhitung > ftable (156,768 > 3.23) this means Ha is accepted Ho is rejected.

Keywords: Application of Public Sector Accounting Reporting Standards. Supervision of Quality of Financial Reporting, Government Performance Accountability

**1. PENDAHULUAN**

PERPRES No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pasal 1 Poin 14 menyatakan bahwa “akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik”.

Setiap pemerintahan akuntabilitas kinerja sangat diperlukan, dikarenakan akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan pemerintah dalam mewujudkan perencanaan kinerja dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, setiap pemerintah wajib

membuat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disetiap akhir tahun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan yang menggambarkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam usaha mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Salah satu rangkaian kegiatan dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran yang bertujuan sebagai bahan pijakan pemerintah dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Kewajiban pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan aktualisasi dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini berisi ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana – rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Oleh karena itu, penyusunan pada RPJMD selain memuat visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021. RKPD juga merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah hingga tahun berkenaan.

Dilihat dari nilai evaluasi kinerja pemerintah terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Bengkulu pada kegiatan RKPD Tahun 2017 memperoleh nilai B dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100% serta opini pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Menurut Pamungkas (2012) penerapan akuntansi keuangan sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal penyajian informasi mengenai tujuan, fungsi, dan objek pengeluaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah menerbitkan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Sistem Akuntansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah. Pemerintah Provinsi Bengkulu menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penelitian yang mendukung pembahasan diatas, oleh Wina, dkk (2014) bahwa semakin tingginya pengaruh penerapan standar akuntansi sektor publik dan pengawasan pelaporan maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin baik. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (2012) menyatakan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor

publik, pengawasan dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan baik secara parsial maupun simultan bilamana peraturan perundang-undangan yang berkualitas diterapkan akan semakin baik hasil kualitas laporan keuangan dalam akuntabilitas pemerintahan.

## 2. LANDASAN TEORI

### a. Pelaporan Keuangan

*American Accounting Association* di kutip oleh Renyowijoyo (2013:9) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Untuk memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Menurut Tanjung (2014:12) Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

### b. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut:

1. Andal  
Informasi andal dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan.
2. Relevan  
Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi

masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan format atau bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

4. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan atas periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan serta dapat membandingkan laporan keuangan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja dan perubahannya secara efektif. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dilakukan secara konsisten.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menjadi penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri”.

Adanya pernyataan yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga pemerintahan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa”

“Penerapan SAP berbasis Kas menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual”

Laporan keuangan yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dari ketujuh penyajian laporan keuangan terdapat lima laporan keuangan SKPD yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Lampiran II.2.h tentang Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Hal.72, yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Operasional
- d. Laporan Perubahan Ekuitas,
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Menurut Yuliani (2010:211) kualitas laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan dedikasi terhadap akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. Alat yang memfasilitasi agar laporan bersifat transparan dan akuntabel yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan menerapkan adanya standar, maka informasi keuangan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dipemerintahan. Kualitas laporan itu sendiri dalam penyajiannya memiliki kriteria antara lain:

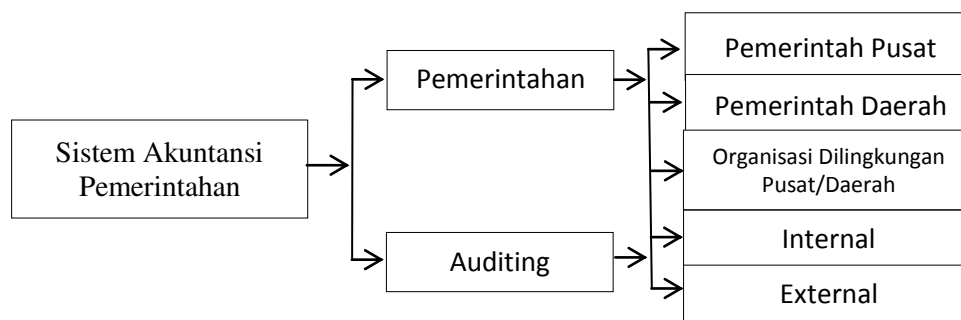
1. Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Kecukupan Pengungkapan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern.

**c. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Sebelum pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan, Menteri Keuangan RI telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan No: 379/KMK.012/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pusat dan daerah, sebagaimana telah berapa kali diubah dan terakhir Keputusan Menteri Keuangan No: 379/KMK.012/2004 tanggal 6 Agustus 2004. Komite ini bekerja dengan melibatkan banyak unsur yang secara formal dinyatakan atas unsur Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Menurut Sinaga (2010:8) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor. Adanya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diyakini akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan di pemerintah baik pusat maupun daerah yang ini berarti informasi keuangan pemerintah akan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

**GAMBAR II.1  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 71/2010**



Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan sebagai acuan bagi:

1. Penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya
2. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar,
4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah baik di pemerintah pusat maupun daerah yang membahas tentang:

1. Tujuan kerangka konseptual
2. Lingkungan akuntansi pemerintahan
3. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
4. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan
5. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum.
6. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan.
7. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan dan pengukurannya.

#### **d. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**

Menurut Ellwood dikutip Renyowijoyo (2013:14) Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas yang mengacu pada pengelolaan suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa di bebani kewajiban untuk melaporkannya. Setiap sektor publik harus memiliki empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum  
Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan hukum yang telah diterapkan.
2. Akuntabilitas proses  
Akuntabilitas proses ini berkaitan pada prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan dalam pengelolah sistem informasi.
3. Akuntabilitas program  
Akuntabilitas ini berkaitan pada pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai maksimal dengan biaya minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan  
Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Dilingkungan pemerintah pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen antara pemimpin dan seluruh staf instansi pemerintah
2. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

4. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai perundang-undangan berlaku.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan aktif dalam perubahan manajemen pemerintah dalam bentuk teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

**e. Pengawasan**

Menurut Schermerhorn (2002:12) pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kinerja yang telah ditetapkan. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya untuk menerapkan *good governance* (pemerintahan baik).

Menurut Rachman (2001:23) pengawasan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewengan
3. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Pada dasarnya pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintahan yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada di dalam lingkungan unit yang bersangkutan seperti pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian yang ada di wilayah Indonesia, sedangkan pengawasan ekstern merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam menjalankan tugasnya BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara.

**3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat penjelasan (eksplanasi) dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada para pejabat/eselon 4 dan staf yang terkait dengan akuntansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah di BPKD, Inspektorat, DPMD dan DPRD Provinsi Bengkulu. Populasi dalam penelitian ini yang diambil adalah seluruh pejabat/eselon 4 dan staf yang berkaitan langsung dengan akuntansi atau keuangan pemerintahan, yaitu:

No	Instansi Pemerintah	Jumlah
1	BPKD Provinsi Bengkulu	13 Orang
2	Inspektorat Provinsi Bengkulu	10 Orang
3	DPMD Provinsi Bengkulu	10 Orang
4	DPRD Provinsi Bengkulu	10 Orang
Total Populasi		43 Orang

Sampel jenuh/sensus adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 43 orang pejabat/eselon 4 dan staf akuntansi yang bekerja di BPKD, Inspektorat, DPMD dan DPRD Provinsi Bengkulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka yaitu ; Studi lapangan (*field research*) merupakan teknik pengumpulan data langsung dari sumber peneliti dan Studi pustaka, teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber data dari laporan penelitian, buku-buku ilmiah, artikel dan juga situs web yang berhubungan dengan penelitian.

#### a. Uji Validitas

Uji validitas menggunakan aplikasi SPSS 24 dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05 yang dilihat dari  $r_{hitung}$  dari  $n=43$ ,  $df=n-2$  atau  $43-2=41$  maka  $r_{tabel}$  statistiknya adalah 0,3008. variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) dapat disimpulkan seluruh itemnya dinyatakan valid karena nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari pada  $r_{tabel}$  (0,3008). Variabel Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) dapat disimpulkan seluruh itemnya dinyatakan valid karena nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari pada  $r_{tabel}$  (0,3008).

#### b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menggunakan nilai konstruk atau variabel memberikan nilai *cronbach alpha* ( $\alpha$ ) > 0,60 maka dikategorikan handal atau reliable. Nilai *cronbach's alpha* dari variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ), Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y) lebih besar dari yang dibandingkan skor penentuan peneliti (0,60), maka data yang digunakan reliabel dan layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Uji Hipotesis

Uji regresi linear berganda diperoleh suatu persamaan regresi  $Y = 6,903 + 0,274X_1 + 0,371X_2$  dengan uji parsial dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak masing-masing nilai koefisien regresi ( $\beta_1$  dan  $\beta_2$ ) secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 24 dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 menggunakan ( $df = n-k$  atau  $43-2=41$  jadi nilai  $t_{tabel}$  yang diperoleh sebesar 1,6828 .

#### 1. Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y).

Berdasarkan hasil uji  $t_{hitung}$  variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) sebesar 2,965 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1.6828 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,965 > 1.6828$  ) Sedangkan berdasarkan perbandingan derajat signifikan 5% atau 0.05 maka variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) sebesar  $0.005 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) berpengaruh



signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y) dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $sig_{hitung} < \text{derajat signifikan}$  ini berarti  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak.

**2. Pengaruh Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y)**

Berdasarkan hasil uji  $t_{hitung}$  variabel Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) sebesar 2,364 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,6828 maka  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,364 > 1,6828$ ) Sedangkan berdasarkan perbandingan derajat signifikan 5% atau 0,05 maka variabel Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) sebesar  $0,023 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y) dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $sig_{hitung} < \text{derajat signifikan}$  ini berarti  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak.

**3. Uji f-simultan**

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 24 dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 menggunakan  $(df) = n-k-1$  atau  $43-2-1=40$  jadi nilai  $f_{tabel}$  yang diperoleh sebesar 3,23,

Berdasarkan hasil uji  $f_{hitung}$  variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) sebesar 156,768 dan  $f_{tabel}$  sebesar 3,23 maka  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $156,768 > 3,23$ ) Sedangkan berdasarkan perbandingan derajat signifikan 5% atau 0,05 maka variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y) dikarenakan  $f_{hitung} > f_{tabel}$  atau  $sig_{hitung} < \text{derajat signifikan}$  ini berarti  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak.

**4. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien korelasi sebesar 0,942, ini menyatakan bahwa hubungan antara Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y) mempunyai hubungan Sangat Kuat. *R square* dimana nilai koefisien determinasi berganda sebesar 0,887 yang mempunyai arti bahwa secara bersama-sama analisis Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Y) pada BPKD, Inspektorat, DPMD dan DPRD Provinsi Bengkulu sebesar 88,7% sedangkan sisanya 11,3% adalah dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dapat di simpulkan bahwa :

1. Secara parsial variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( $Y$ ).
2. Secara simultan variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( $Y$ ).
3. Variabel Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor Publik ( $X_1$ ) dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan ( $X_2$ ) terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( $Y$ ) memiliki koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,887 atau 88,7% sedangkan sisanya 11,3% adalah dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Dharma, Rio Rizkita. 2014. *Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Penerapan Sistem Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kota Pariaman*. Padang: Jurnal Prodi Akuntansi Universitas Negeri Padang
2. Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
3. LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta : Penerbit LAN
4. Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba
5. Pamungkas, Bambang. 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Bogor: Jurnal Sekolah Tinggi Ekonomi Kesatuan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018.
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
11. Schermerhorn. 2002. *Management*, 7<sup>th</sup>ed. New Jersey: Prentice Hall
12. Setiawan. 2010. *Ekonometrika*. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset
13. Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif (dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS) Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Kencana
14. Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
15. Sunyoto, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Penerbit Refika Aditama.
16. Tanjung, Abdul Hafiz. 2014. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis AkruaI Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010*. Bandung: Penerbit Alfabeta
17. Yuliani. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Aceh: Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 3 (2) PP. 206-220
18. Wina, Intan Permata Haska. Khairani, Siti.. 2014. *Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan Akuntansi Sektor ,Publik dan Pengawasn Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*. Palembang: Jurnal Jurusan Akuntansi STIE MDP
19. <http://bengkulu.bpk.go.id/> diakses pada tanggal 31 Mei 2018 Pukul 16.30
20. <http://bengkuluprov.go.id/> diakses pada tanggal 31 Mei 2018 Pukul 19.30